

ANALISIS PENERAPAN PSAK 116 TENTANG SEWA SEBAGAI PENGEMBANGAN PSAK 73 DAN DAMPAKNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK: PENDEKATAN CASE BASED LEARNING

Veline Raphaella Hartono¹, Rimi Gusliana Mais²
velineraphaella@gmail.com¹, rimi_gusliana@stei.ac.id²

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie¹, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 116 tentang sewa sebagai pengembangan PSAK 73 serta dampaknya terhadap laporan keuangan PT Matahari Department Store Tbk. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Case Based Learning (CBL) melalui studi kasus berdasarkan Annual Report dan laporan keuangan PT Matahari Department Store Tbk tahun 2024–2025. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi sewa serta dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan PSAK 73 melalui pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan. Penerapan standar tersebut meningkatkan transparansi laporan keuangan karena seluruh kewajiban sewa diakui secara langsung dalam laporan posisi keuangan. Selain itu, penerapan standar sewa memengaruhi struktur aset, liabilitas, beban bunga, serta rasio keuangan perusahaan, terutama rasio leverage dan profitabilitas. Dari perspektif teori agensi, penerapan standar ini mampu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan. Sementara itu, dari perspektif teori kepatuhan, implementasi standar mencerminkan komitmen perusahaan dalam memenuhi ketentuan akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, penerapan PSAK 73 yang dianalisis dalam konteks pengembangan PSAK 116 berkontribusi terhadap peningkatan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan.

Kata Kunci: PSAK 116, PSAK 73, Sewa, Laporan Keuangan, Aset Hak Guna.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of PSAK 116 on leases as a development of PSAK 73 and its impact on the financial statements of PT Matahari Department Store Tbk. The research employs a qualitative method using a Case Based Learning (CBL) approach through a case study based on the 2024–2025 Annual Reports and financial statements of PT Matahari Department Store Tbk. Data were analyzed descriptively to identify the recognition, measurement, and presentation of lease transactions and their effects on the company's financial statements. The results indicate that the company has implemented PSAK 73 through the recognition of right-of-use assets and lease liabilities in its statement of financial position. The implementation of the lease accounting standard enhances financial reporting transparency by requiring lease obligations to be recognized directly in the financial statements. Furthermore, the standard affects the company's asset structure, liabilities, interest expenses, and financial ratios, particularly leverage and profitability ratios. From the perspective of Agency Theory, the implementation of the standard helps reduce information asymmetry between management and shareholders. Meanwhile, from the perspective of Compliance Theory, the implementation reflects the company's commitment to complying with applicable accounting standards. Therefore, the implementation of PSAK 73, analyzed within the context of the development of PSAK 116, contributes to improving the quality, transparency, and accountability of the company's financial reporting.

Keywords: PSAK 116, PSAK 73, Lease, Financial Statements, Right-Of-Use Assets.

PENDAHULUAN

Standar akuntansi internasional yang mengatur transaksi sewa adalah IFRS 16 Leases yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB). IFRS 16 hadir sebagai penyempurnaan dari IAS 17 dengan tujuan meningkatkan transparansi dan relevansi laporan keuangan, khususnya dalam pengakuan kewajiban sewa yang sebelumnya banyak tidak tercermin dalam laporan posisi keuangan. Dalam IFRS 16, seluruh transaksi sewa pada pihak lessee diwajibkan untuk diakui sebagai aset hak guna (right-of-use asset) dan liabilitas sewa, sehingga memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai kondisi keuangan perusahaan. Penerapan standar ini juga bertujuan untuk mengurangi praktik off-balance sheet financing yang sebelumnya sering terjadi pada transaksi sewa operasi, sehingga meningkatkan keandalan informasi bagi para pengguna laporan keuangan (Santoso, 2024).

Dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menjadi pedoman utama yang digunakan oleh entitas. Seiring dengan perkembangan ekonomi global serta kebutuhan untuk menyelaraskan standar nasional dengan standar internasional, Ikatan Akuntan Indonesia secara rutin melakukan pembaruan PSAK agar sesuai dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). Salah satu bentuk adopsi tersebut adalah diterapkannya IFRS 16 Leases ke dalam standar nasional menjadi PSAK 116 tentang Sewa yang mulai berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, penerapan standar ini juga sebelumnya dikenal luas melalui PSAK 73 yang merupakan adopsi langsung IFRS 16 dalam konteks Indonesia dan menjadi dasar utama dalam pencatatan transaksi sewa oleh entitas. PSAK 116 pada dasarnya merupakan bentuk penyesuaian dan penyempurnaan lebih lanjut dari PSAK 73 (Nabila & Febriyanti, 2025).

PSAK 116 menggantikan PSAK 30 yang sebelumnya masih membedakan perlakuan antara sewa operasi dan sewa pembiayaan, sehingga banyak transaksi sewa tidak tercermin dalam laporan posisi keuangan. Dengan penerapan PSAK 116, seluruh transaksi sewa diwajibkan untuk diakui dalam laporan keuangan, kecuali untuk sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan serta memberikan informasi yang lebih relevan bagi investor dan kreditor dalam pengambilan Keputusan (Kinanti & Alvia, 2025).

Penerapan PSAK 116 membawa perubahan signifikan dalam perlakuan akuntansi transaksi sewa, khususnya bagi pihak lessee. Perusahaan kini harus mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa berdasarkan nilai kini dari pembayaran sewa di masa depan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip dalam PSAK 116 yang menekankan pengakuan seluruh transaksi sewa ke dalam laporan posisi keuangan. Selain itu, beban sewa yang sebelumnya diakui sebagai beban operasional kini diklasifikasikan menjadi beban penyusutan atas aset hak guna dan beban bunga atas liabilitas sewa. Perubahan ini berdampak langsung pada laporan keuangan, termasuk peningkatan total aset dan liabilitas serta perubahan dalam rasio keuangan seperti leverage dan profitabilitas Perusahaan (Kinanti & Alvia, 2025). Dengan demikian, PSAK 116 yang berlandaskan PSAK 73 memberikan dampak yang signifikan terhadap penyajian laporan keuangan Perusahaan.

Meskipun PSAK 116 telah diberlakukan secara efektif, dalam praktiknya masih banyak perusahaan di Indonesia yang menghadapi berbagai kendala dalam penerapannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan masih mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kontrak yang memenuhi kriteria sewa, menentukan tingkat diskonto yang tepat, serta melakukan pengukuran aset hak guna dan liabilitas sewa secara akurat. Selain itu, masih ditemukan praktik di mana perusahaan mencatat transaksi sewa sebagai beban operasional tanpa melakukan pengakuan aset dan liabilitas sesuai standar, yang menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip yang telah diatur sejak PSAK 73. Hal

ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan standar akuntansi dengan praktik di lapangan yang berpotensi menurunkan kualitas dan transparansi laporan keuangan (Amanda & Sari, 2025).

Fenomena tersebut menjadi semakin relevan pada perusahaan yang bergerak di sektor retail fashion, yang umumnya memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap aset sewa berupa gerai atau toko yang berlokasi di pusat perbelanjaan. Perusahaan seperti PT Matahari Department Store Tbk merupakan contoh entitas retail fashion yang menjalankan operasional bisnisnya melalui banyak lokasi sewa dengan jangka waktu tertentu. Berdasarkan laporan tahunan 2025, perusahaan mencatat aset hak guna sebesar Rp1.939.700.000, yang menunjukkan penerapan PSAK 73 sebagai dasar pengakuan transaksi sewa dalam laporan keuangan. Namun, nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp 2.195.900.000, yang mengindikasikan adanya perubahan strategi seperti efisiensi sewa dan penutupan gerai. Dalam praktiknya, masih terdapat kemungkinan bahwa transaksi sewa tidak sepenuhnya diakui sesuai standar yang diatur dalam PSAK 116.

Penelitian mengenai penerapan PSAK 116 di Indonesia selama ini cenderung berfokus pada dampak makro terhadap laporan keuangan, seperti perubahan rasio keuangan, profitabilitas, dan solvabilitas perusahaan. Namun, kajian yang membahas implementasi teknis secara mendalam, khususnya dalam konteks studi kasus perusahaan ritel, masih terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengaitkan antara kebijakan akuntansi sewa berbasis PSAK 73 sebagai dasar dengan PSAK 116 sebagai pengembangan, terhadap keputusan strategis perusahaan, seperti efisiensi operasional dan restrukturisasi gerai.

Selain itu, aspek pengendalian internal dan pencatatan atas transaksi sewa berbasis PSAK 116 juga belum banyak dikaji secara mendalam, padahal penerapannya melibatkan pertimbangan profesional yang kompleks, seperti penentuan tingkat diskonto, estimasi jangka waktu sewa, serta potensi risiko salah saji material dalam laporan keuangan (Ferawati & Sinaga, 2025). Di sisi lain, keterbatasan sistem informasi dan kesiapan sumber daya manusia turut menjadi tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) dalam kajian yang mengintegrasikan implementasi teknis, kendala operasional terhadap PSAK 116, khususnya dalam konteks studi kasus pada perusahaan seperti Matahari Department Store Tbk.

Di tingkat internasional, berbagai penelitian telah mengkaji dampak penerapan IFRS 16 Leases terhadap transparansi laporan keuangan dan kualitas informasi yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IFRS 16 mampu meningkatkan transparansi dengan mengurangi praktik off-balance sheet serta meningkatkan relevansi informasi bagi pengguna laporan keuangan. Namun demikian, penerapan standar ini juga menimbulkan tantangan berupa peningkatan kompleksitas pelaporan serta tingginya penggunaan estimasi dan pertimbangan profesional, khususnya dalam menentukan jangka waktu sewa dan tingkat diskonto (Ananta et al., 2026).

Selain itu, penelitian internasional menunjukkan hasil yang beragam antar negara, di mana perbedaan kondisi ekonomi, regulasi, serta karakteristik perusahaan menyebabkan tingkat keberhasilan implementasi IFRS 16 tidak seragam. Beberapa studi juga menemukan bahwa meskipun transparansi meningkat, perbandingan laporan keuangan antar entitas masih dipengaruhi oleh variasi asumsi dan kebijakan akuntansi yang digunakan. Oleh karena itu, hasil penelitian internasional belum sepenuhnya dapat digeneralisasi pada konteks negara berkembang seperti Indonesia, sehingga diperlukan penelitian yang lebih kontekstual terkait implementasi IFRS 16 yang telah diadopsi menjadi PSAK 73 dan selanjutnya disempurnakan dalam PSAK 116 (Lopes & Penela, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi PSAK 116 menjadi penting untuk memahami kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan PSAK 116 sebagai dasar standar sewa di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur akuntansi, khususnya terkait implementasi standar akuntansi sewa di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis bagi perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap PSAK 116 serta meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keuangan.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengkaji penerapan PSAK 116 melalui pendekatan studi kasus pada perusahaan ritel, serta mengaitkannya dengan implementasi dari PSAK 73 ke PSAK 116, sehingga diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi serta memberikan manfaat praktis bagi perusahaan dalam mengimplementasikan standar akuntansi sewa secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menutup kesenjangan penelitian yang ada serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi dan praktik profesional (Nabila & Febriyanti, 2025).

KAJIAN TEORI

1. Teori Agensi (Agency Theory)

Menurut Jensen & Meckling (1976) dan menurut Alvionita et al., (2025) Dalam teori agensi, asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan dapat mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan standar akuntansi yang mampu meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi manipulasi informasi keuangan. Dalam kondisi ini, manajemen berpotensi mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, termasuk dalam penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, standar akuntansi seperti PSAK 73 hadir untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa.

Penerapan PSAK 73 pada PT Matahari Department Store Tbk menjadi penting untuk mengurangi potensi manipulasi atau penyembunyian kewajiban sewa yang sebelumnya tidak tercatat dalam laporan keuangan. Dengan adanya standar ini, seluruh transaksi sewa harus diakui secara lebih transparan sehingga dapat meminimalisir konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik. Selain itu, implikasi terhadap PSAK 116 juga menunjukkan bagaimana perubahan pencatatan sewa dapat memengaruhi pengakuan aset tetap dan struktur keuangan perusahaan, sehingga memperkuat fungsi pengawasan terhadap tindakan manajemen dan bertujuan untuk mengurangi praktik *off-balance sheet*, yaitu kondisi dimana kewajiban atau transaksi tidak dicatat dalam neraca (laporan posisi keuangan) perusahaan, tetapi tetap memiliki dampak ekonomi. Sebelum PSAK 116, praktik ini memungkinkan perusahaan menyembunyikan kewajiban sewa melalui pengklasifikasian tertentu. Namun, dengan mengakui seluruh transaksi sewa sebagai aset dan liabilitas, PSAK 116 membantu meningkatkan transparansi laporan keuangan serta kualitas informasi yang disajikan (Sura & Ventura, 2024).

2. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan (compliance theory) ditemukan oleh Stanley Milgram (1963) dan menurut Fitri et al., (2024) Teori kepatuhan (compliance theory) menjelaskan bahwa individu atau organisasi cenderung mematuhi aturan dan standar yang berlaku karena adanya kewajiban normatif, tekanan regulasi, serta kebutuhan untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Dalam konteks akuntansi, kepatuhan terhadap standar akuntansi seperti PSAK 73 dan PSAK 116 menjadi penting untuk memastikan laporan keuangan disusun secara transparan, andal, dan dapat dibandingkan antar perusahaan. Kepatuhan terhadap standar tersebut tidak hanya didorong oleh kewajiban hukum, tetapi juga oleh kebutuhan perusahaan dalam menjaga reputasi dan meningkatkan kualitas

informasi keuangan bagi pengguna laporan keuangan.

Dalam penelitian ini, kepatuhan PT Matahari Department Store Tbk terhadap penerapan PSAK 116 mencerminkan sejauh mana perusahaan mengikuti regulasi terbaru dalam pelaporan keuangan. Implementasi standar tersebut dapat memengaruhi pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi sewa, serta berdampak pada hubungan dengan PSAK 116. Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, perusahaan diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan dan kredibel, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan pihak eksternal lainnya (Nurhasanah et al., 2026)

3. Konsep PSAK 116 & PSAK 73

PSAK 116 tentang sewa merupakan standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sewa dalam laporan keuangan. Standar ini mengadopsi IFRS 16 Leases yang diterbitkan oleh IFRS Foundation dan bertujuan meningkatkan transparansi laporan keuangan melalui pengakuan seluruh transaksi sewa dalam laporan posisi keuangan. PSAK 116 berlaku efektif sejak 2024 dan menggantikan standar sebelumnya yang masih memungkinkan adanya perlakuan *off-balance sheet* pada sewa operasi. Menurut (Fitriyani & Febrianto, 2025), sewa merupakan kontrak yang memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset selama periode waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Definisi ini menekankan dua unsur utama, yaitu hak pengendalian atas aset dan adanya manfaat ekonomi dari penggunaannya. Dengan demikian, kontrak sewa memiliki implikasi langsung terhadap pengakuan aset dan kewajiban perusahaan dalam laporan keuangan.

Dalam penerapannya, PSAK 116 mensyaratkan pihak lessee untuk mengakui aset hak guna (*right-of-use asset*) dan liabilitas sewa pada awal masa sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah (Aldebaran et al., 2024). Pengakuan ini bertujuan mencerminkan kewajiban ekonomi secara lebih realistis serta meningkatkan kualitas informasi dalam laporan keuangan. Liabilitas sewa diukur berdasarkan nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayar dengan menggunakan tingkat diskonto tertentu, sedangkan aset hak guna diukur sebesar jumlah liabilitas sewa yang disesuaikan dengan biaya terkait lainnya. Selanjutnya, aset hak guna akan disusutkan dan liabilitas sewa akan dikenakan bunga selama masa sewa.

Penerapan PSAK 116 juga menghilangkan praktik *off-balance sheet* yang sebelumnya terjadi pada standar lama, sehingga seluruh kewajiban sewa tercermin dalam laporan posisi keuangan dan meningkatkan transparansi serta akurasi informasi keuangan perusahaan (Rizaldi & Munandar, 2025). Di sisi lain, PSAK 73 merupakan standar sebelumnya yang juga mengatur akuntansi sewa dengan mengadopsi IFRS 16, sehingga secara substansi memiliki prinsip yang sama dengan PSAK 116 (Santoso, 2024). PSAK 73 menekankan pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa sebagai bentuk representasi kewajiban ekonomi perusahaan, serta menghapus perlakuan sewa operasi di luar laporan posisi keuangan. Dengan demikian, hubungan antara PSAK 116 dan PSAK 73 menunjukkan adanya kesinambungan dalam pengaturan akuntansi sewa di Indonesia, di mana kedua standar tersebut memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan. Perbedaan yang ada lebih bersifat pada penyesuaian dan perkembangan standar, sementara prinsip dasar yang digunakan tetap mengacu pada IFRS 16.

4. Landasan Konseptual

Penerapan standar akuntansi sewa modern yang mengacu pada IFRS 16 dan diadopsi dalam PSAK 73 serta sering dikaitkan dengan PSAK 116 merupakan upaya untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan. Standar ini mengharuskan perusahaan mengakui aset hak guna (*right-of-use asset*) dan liabilitas sewa dalam laporan posisi

keuangan, sehingga kewajiban ekonomi perusahaan dapat tercermin secara lebih akurat. Perubahan ini bertujuan mengatasi kelemahan standar sebelumnya yang memungkinkan praktik *off-balance sheet*, sehingga informasi keuangan menjadi kurang representatif (Ananta et al., 2026).

Dalam perspektif teori agensi, penerapan PSAK 116 berperan sebagai mekanisme pengendalian untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan. Pengakuan aset dan liabilitas sewa membuat manajemen tidak lagi dapat menyembunyikan kewajiban ekonomi di luar neraca, sehingga meningkatkan transparansi dan kualitas informasi keuangan. Hal ini mempermudah pemilik dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan secara lebih efektif (Susanti et al., 2021). Selain itu, dari sudut pandang teori kepatuhan, perusahaan diwajibkan untuk mengikuti standar akuntansi yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab terhadap regulator dan pemangku kepentingan. Kepatuhan terhadap PSAK 73 sebagai adopsi IFRS 16 mencerminkan komitmen perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang andal, relevan, dan sesuai regulasi (Respati, 2024).

Secara konseptual, penerapan PSAK 116 berdampak langsung terhadap struktur laporan keuangan perusahaan. Pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa menyebabkan peningkatan total aset dan liabilitas, serta perubahan dalam pengakuan beban dari beban sewa menjadi beban depresiasi dan bunga. Perubahan ini turut memengaruhi rasio keuangan seperti *debt to equity ratio* (DER) dan *return on assets* (ROA), yang merupakan indikator penting dalam menilai kinerja perusahaan. Berdasarkan hubungan antara teori agensi, teori kepatuhan, dan konsep PSAK 116, dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi sewa memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis penerapan PSAK 116 pada perusahaan, khususnya dalam mengidentifikasi pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa serta dampaknya terhadap laporan keuangan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian praktik akuntansi dengan standar yang berlaku serta implikasinya terhadap kinerja keuangan perusahaan (Rodiah et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menghasilkan pemahaman mendalam mengenai penerapan PSAK 73 dan implikasinya dalam konteks pengembangan ke PSAK 116. Penelitian ini berfokus pada bagaimana perusahaan mengakui, mengukur, dan menyajikan transaksi sewa dalam laporan keuangan serta dampaknya terhadap kondisi keuangan perusahaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Case Based Learning (CBL). Metode ini digunakan dengan cara menganalisis kasus nyata yang terjadi pada PT Matahari Department Store Tbk berdasarkan laporan tahunan (*annual report*) tahun 2025. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami penerapan PSAK 73 yang menjadi dasar pengembangan PSAK 116 dalam praktik perusahaan, khususnya terkait pencatatan aset hak guna (*right-of-use asset*), liabilitas sewa, dan dampaknya terhadap laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi perusahaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari:

- Annual Report PT Matahari Department Store Tbk tahun 2025
- Laporan Keuangan PT Matahari Department Store
- PSAK 73 tentang Sewa
- PSAK 116 tentang Sewa
- Jurnal dan artikel ilmiah terkait IFRS 16, PSAK 73, dan PSAK 116

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan dan menelaah laporan tahunan & keuangan perusahaan, standar akuntansi, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan transaksi sewa dan implementasi PSAK 73 serta PSAK 116.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Mengidentifikasi kebijakan pencatatan sewa PT Matahari Department Store Tbk.
2. Menganalisis penerapan PSAK 73 dalam laporan keuangan perusahaan.
3. Mengkaji kesesuaian penerapan tersebut terhadap pengembangan PSAK 116.
4. Menganalisis dampak penerapan standar sewa terhadap laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi perusahaan.
5. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum PT Matahari Department Store Tbk

PT Matahari Department Store Tbk merupakan perusahaan ritel yang bergerak di bidang penjualan produk fashion, aksesoris, kecantikan, serta perlengkapan rumah tangga. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1958 dan menjadi salah satu perusahaan ritel terbesar di Indonesia dengan jaringan gerai yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan Annual Report 2025, Matahari menjalankan kegiatan operasional melalui berbagai gerai yang sebagian besar berlokasi di pusat perbelanjaan dan menggunakan aset sewa dalam aktivitas usahanya.

Sebagai perusahaan ritel fashion, Matahari memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap penggunaan aset sewa, khususnya untuk toko dan gerai operasional. Tingginya penggunaan aset sewa menyebabkan penerapan standar akuntansi terkait sewa menjadi sangat penting dalam penyajian laporan keuangan perusahaan.

Selain itu, kondisi operasional perusahaan pada tahun 2025 menunjukkan adanya penyesuaian strategi bisnis melalui efisiensi biaya dan optimalisasi gerai. Hal tersebut terlihat dari adanya penutupan beberapa gerai yang memiliki kinerja kurang optimal serta dilakukannya negosiasi sewa dengan pemilik properti untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transaksi sewa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas operasional dan laporan keuangan perusahaan.

2. Penerapan PSAK 73 tentang Sewa pada PT Matahari Department Store Tbk

Penerapan PSAK 73 tentang sewa pada PT Matahari Department Store Tbk dapat dilihat melalui pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan perusahaan. PSAK 73 mewajibkan perusahaan untuk mengakui seluruh transaksi sewa ke dalam laporan posisi keuangan sebagai aset hak guna dan kewajiban sewa, sehingga transaksi sewa tidak lagi dicatat hanya sebagai beban operasional seperti pada standar sebelumnya.

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2025, perusahaan mencatat aset hak guna sebesar Rp1.939.658.000.000, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.195.941.000.000. Penurunan nilai aset hak guna tersebut menunjukkan adanya pengurangan penggunaan aset sewa yang dipengaruhi oleh strategi efisiensi operasional perusahaan, termasuk penutupan gerai dan optimalisasi ruang usaha.

Penerapan PSAK 73 juga berdampak pada perubahan pengakuan beban dalam laporan laba rugi perusahaan. Beban sewa yang sebelumnya dicatat sebagai beban operasional kini

diklasifikasikan menjadi beban penyusutan aset hak guna dan beban bunga atas liabilitas sewa. Perubahan tersebut menyebabkan struktur laporan keuangan perusahaan menjadi lebih transparan karena kewajiban sewa dapat terlihat secara langsung dalam laporan posisi keuangan perusahaan.

Selain aset hak guna, perusahaan juga mencatat liabilitas sewa jangka pendek dan jangka panjang dalam laporan keuangannya. Pada tahun 2024, liabilitas sewa jangka pendek tercatat sebesar Rp537.288.000.000 dan meningkat menjadi Rp551.491.000.000 pada tahun 2025. Sementara itu, liabilitas sewa jangka panjang mengalami penurunan dari Rp2.305.838.000.000 pada tahun 2024 menjadi Rp2.018.450.000.000 pada tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mulai mengurangi kewajibannya melalui strategi efisiensi dan optimalisasi penggunaan gerai.

Penerapan PSAK 73 juga berdampak terhadap perubahan pengakuan beban dalam laporan laba rugi perusahaan. Beban sewa yang sebelumnya dicatat sebagai beban operasional kini diklasifikasikan menjadi beban penyusutan aset hak guna dan beban bunga atas liabilitas sewa. Pada tahun 2024, perusahaan mencatat beban bunga dan keuangan sebesar Rp269.625.000.000, sedangkan pada tahun 2025 beban tersebut menurun menjadi Rp246.217.000.000. Penurunan tersebut menunjukkan adanya penurunan kewajiban sewa perusahaan yang berdampak terhadap menurunnya beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan.

3. Analisis Pengembangan PSAK 73 menjadi PSAK 116

PSAK 116 merupakan bentuk pengembangan dan penyempurnaan dari PSAK 73 yang mengatur mengenai perlakuan akuntansi transaksi sewa. Pengembangan standar ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan perusahaan dengan mewajibkan pengakuan transaksi sewa dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Dalam PSAK 116, transaksi sewa tidak lagi diperlakukan hanya sebagai beban operasional, tetapi harus diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa sehingga seluruh kewajiban perusahaan dapat tercermin secara lebih jelas dalam laporan keuangan.

Penerapan PSAK 73 pada PT Matahari Department Store Tbk menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip dasar yang kemudian dikembangkan dalam PSAK 116. Hal tersebut terlihat dari pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan perusahaan serta perubahan perlakuan akuntansi beban sewa menjadi beban penyusutan dan beban bunga. Penerapan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian perusahaan terhadap standar akuntansi berbasis IFRS yang bertujuan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

Selain berdampak pada aspek akuntansi, pengembangan PSAK 73 menjadi PSAK 116 juga mempengaruhi pengelolaan operasional perusahaan. Dalam annual report tahun 2025, perusahaan menjelaskan adanya strategi efisiensi melalui optimalisasi gerai, penutupan toko yang kurang produktif, dan negosiasi sewa dengan pemilik properti. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa transaksi sewa tidak hanya dipandang sebagai aktivitas operasional biasa, tetapi juga sebagai bagian penting dalam strategi bisnis perusahaan.

Pengembangan PSAK 116 juga memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan karena meningkatkan transparansi terhadap kewajiban perusahaan. Investor dan kreditor dapat menilai kondisi keuangan perusahaan secara lebih realistis karena kewajiban sewa telah diakui secara langsung dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Dengan demikian, penerapan PSAK 116 memberikan kualitas informasi akuntansi yang lebih baik dibandingkan standar sebelumnya yang masih memungkinkan adanya transaksi sewa di luar laporan posisi keuangan.

4. Dampak Penerapan PSAK 73 dan PSAK 116 terhadap Laporan Keuangan

Penerapan PSAK 73 dan pengembangannya dalam PSAK 116 memberikan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan PT Matahari Department Store Tbk. Dampak tersebut dapat dilihat dari perubahan struktur aset, liabilitas, serta laba perusahaan akibat pengakuan transaksi sewa ke dalam laporan posisi keuangan perusahaan.

Dalam laporan posisi keuangan tahun 2024, perusahaan mencatat total aset sebesar Rp5.140.75.000.000, sedangkan pada tahun 2025 total aset perusahaan sedikit menurun menjadi Rp5.138.629.000.000. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya nilai aset hak guna perusahaan akibat efisiensi penggunaan aset sewa dan penyesuaian jumlah gerai operasional perusahaan. Selain itu, nilai aset hak guna yang cukup besar menunjukkan bahwa transaksi sewa memiliki kontribusi yang signifikan terhadap struktur aset perusahaan.

Selain berdampak terhadap aset, penerapan PSAK 73 dan PSAK 116 juga mempengaruhi jumlah liabilitas perusahaan. Pada tahun 2024, total liabilitas perusahaan tercatat sebesar Rp4.814.965.000.000 dan meningkat menjadi Rp4.865.724.000.000 miliar pada tahun 2025. Tingginya total liabilitas perusahaan dipengaruhi oleh pengakuan liabilitas sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Dengan adanya pengakuan liabilitas tersebut, laporan keuangan perusahaan menjadi lebih transparan karena seluruh kewajiban sewa tercermin secara langsung dalam laporan posisi keuangan perusahaan.

Penerapan PSAK 73 dan PSAK 116 juga memberikan dampak terhadap laba perusahaan. Pada tahun 2024, perusahaan mencatat laba bersih sebesar Rp827.653.000.000, sedangkan pada tahun 2025 laba bersih perusahaan mengalami penurunan menjadi Rp725.379.000.000. Penurunan laba tersebut dipengaruhi oleh menurunnya penjualan perusahaan dari Rp6.398.770.000.000 pada tahun 2024 menjadi Rp5.784.718.000.000 pada tahun 2025. Penurunan penjualan tersebut menunjukkan bahwa kondisi operasional perusahaan masih menghadapi tekanan sehingga berdampak terhadap profitabilitas perusahaan.

Selain mempengaruhi aset, liabilitas, dan laba perusahaan, penerapan PSAK 73 dan PSAK 116 juga berdampak terhadap rasio keuangan perusahaan, khususnya rasio leverage dan profitabilitas. Pengakuan liabilitas sewa menyebabkan debt to equity ratio (DER) perusahaan meningkat karena jumlah kewajiban perusahaan menjadi lebih besar dibandingkan modal yang dimiliki. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap kewajiban jangka panjang akibat transaksi sewa yang dimiliki perusahaan.

Di sisi lain, return on assets (ROA) perusahaan mengalami penurunan seiring dengan menurunnya laba bersih perusahaan pada tahun 2025. Penurunan ROA menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pengakuan aset hak guna dalam laporan posisi keuangan serta penurunan laba perusahaan akibat kondisi operasional dan penjualan yang menurun.

Meskipun demikian, penerapan PSAK 73 dan PSAK 116 tetap memberikan manfaat yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa membuat laporan posisi keuangan perusahaan menjadi lebih transparan dan realistis sehingga investor dan kreditor dapat menilai kondisi keuangan perusahaan secara lebih akurat dibandingkan sebelum penerapan standar tersebut.

5. Analisis Berdasarkan Teori Agensi dan Teori Kepatuhan

Penerapan PSAK 73 dan pengembangannya dalam PSAK 116 pada PT Matahari Department Store Tbk memiliki keterkaitan yang erat dengan teori agensi dan teori kepatuhan. Dalam perspektif teori agensi, penerapan standar akuntansi sewa berperan sebagai mekanisme pengendalian untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen

dan pemilik perusahaan. Sebelum diterapkannya PSAK 73 dan PSAK 116, perusahaan masih memiliki kemungkinan untuk mencatat transaksi sewa operasi di luar laporan posisi keuangan sehingga kewajiban perusahaan tidak terlihat secara menyeluruh.

Dengan diterapkannya PSAK 73 dan PSAK 116, perusahaan diwajibkan untuk mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa secara langsung dalam laporan posisi keuangan. Pengakuan tersebut membuat seluruh kewajiban ekonomi perusahaan menjadi lebih transparan sehingga dapat mengurangi potensi manipulasi atau penyembunyian kewajiban perusahaan oleh manajemen. Kondisi tersebut membantu pemilik perusahaan dan investor dalam melakukan pengawasan terhadap kondisi keuangan perusahaan secara lebih efektif.

Selain berkaitan dengan teori agensi, penerapan PSAK 73 dan PSAK 116 juga mencerminkan implementasi teori kepatuhan. Dalam teori kepatuhan, perusahaan diharapkan mampu mematuhi regulasi dan standar akuntansi yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab terhadap regulator dan pemangku kepentingan. PT Matahari Department Store Tbk menunjukkan kepatuhannya terhadap standar akuntansi melalui pengakuan transaksi sewa sesuai ketentuan PSAK 73 dan PSAK 116 dalam laporan keuangan perusahaan.

Kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi tersebut memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan karena informasi yang disajikan menjadi lebih andal, relevan, dan dapat dibandingkan. Selain itu, kepatuhan terhadap PSAK 116 juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor karena laporan keuangan perusahaan dianggap telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Dengan demikian, penerapan PSAK 73 dan PSAK 116 pada PT Matahari Department Store Tbk tidak hanya berdampak terhadap aspek teknis pencatatan akuntansi, tetapi juga berkaitan dengan upaya perusahaan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi akuntansi yang berlaku.

6. Kendala dan Tantangan Penerapan PSAK 116

Meskipun penerapan PSAK 73 dan PSAK 116 memberikan manfaat terhadap peningkatan transparansi laporan keuangan, implementasi standar tersebut juga menimbulkan berbagai kendala dan tantangan bagi perusahaan. Salah satu tantangan utama dalam penerapan PSAK 116 adalah proses identifikasi kontrak yang memenuhi kriteria sewa. Perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap seluruh kontrak operasional untuk menentukan apakah kontrak tersebut mengandung unsur sewa sesuai dengan ketentuan standar akuntansi.

Selain itu, perusahaan juga menghadapi kesulitan dalam menentukan tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai kini liabilitas sewa. Penentuan tingkat diskonto memerlukan pertimbangan profesional karena dapat mempengaruhi jumlah aset hak guna dan liabilitas sewa yang diakui dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Kesalahan dalam menentukan tingkat diskonto dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi kurang akurat.

Selain itu, perusahaan juga menghadapi kesulitan dalam menentukan tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai kini liabilitas sewa. Penentuan tingkat diskonto memerlukan pertimbangan profesional karena dapat mempengaruhi jumlah aset hak guna dan liabilitas sewa yang diakui dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Kesalahan dalam menentukan tingkat diskonto dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi kurang akurat.

Tantangan lainnya adalah penentuan jangka waktu sewa dan estimasi pembayaran sewa di masa mendatang. Dalam praktiknya, perusahaan perlu mempertimbangkan kemungkinan perpanjangan kontrak, perubahan nilai pembayaran sewa, serta kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kontrak sewa perusahaan. Kompleksitas tersebut menyebabkan penerapan PSAK 116 memerlukan sistem pencatatan dan pengendalian internal yang lebih baik dibandingkan standar sebelumnya.

Selain tantangan teknis, penerapan PSAK 116 juga berdampak terhadap struktur laporan keuangan perusahaan. Pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa menyebabkan total aset dan kewajiban perusahaan meningkat sehingga mempengaruhi rasio leverage perusahaan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi persepsi investor dan kreditor terhadap tingkat risiko perusahaan karena jumlah kewajiban perusahaan terlihat lebih besar dibandingkan sebelum penerapan PSAK 116.

Dalam konteks PT Matahari Department Store Tbk, perusahaan juga menghadapi tantangan operasional berupa efisiensi gerai dan optimalisasi biaya sewa akibat perubahan kondisi industri ritel. Perusahaan perlu melakukan negosiasi sewa dengan pemilik properti dan penyesuaian jumlah gerai untuk menjaga stabilitas operasional perusahaan. Oleh karena itu, penerapan PSAK 116 tidak hanya berkaitan dengan perubahan standar akuntansi, tetapi juga mempengaruhi strategi bisnis dan pengambilan keputusan perusahaan secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Matahari Department Store Tbk telah menerapkan pencatatan transaksi sewa sesuai dengan PSAK 73 yang menjadi dasar pengaturan akuntansi sewa di Indonesia dan dianalisis dalam konteks pengembangan PSAK 116. Penerapan tersebut terlihat dari pengakuan aset hak guna (right-of-use asset) dan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan perusahaan, sehingga kewajiban ekonomi perusahaan dapat disajikan secara lebih transparan dibandingkan standar sebelumnya yang masih memungkinkan adanya praktik off-balance sheet financing (Santoso, 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 73 dan pengembangannya dalam PSAK 116 memberikan dampak terhadap struktur laporan keuangan PT Matahari Department Store Tbk. Pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa menyebabkan perubahan pada total aset, total liabilitas, beban bunga, serta rasio keuangan perusahaan. Selain itu, terjadi penurunan nilai aset hak guna dan liabilitas sewa jangka panjang yang mengindikasikan adanya strategi efisiensi operasional melalui optimalisasi gerai dan pengelolaan kontrak sewa yang lebih efektif.

Berdasarkan perspektif teori agensi, penerapan PSAK 73 dan PSAK 116 berperan dalam mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan melalui peningkatan transparansi pengungkapan transaksi sewa. Sementara itu, berdasarkan teori kepatuhan, implementasi standar tersebut menunjukkan komitmen perusahaan dalam memenuhi ketentuan akuntansi yang berlaku sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih andal, relevan, dan dapat dibandingkan (Alvionita et al., 2025).

Secara keseluruhan, penerapan PSAK 73 yang dianalisis dalam konteks pengembangan PSAK 116 telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan PT Matahari Department Store Tbk. Dengan demikian, informasi keuangan yang disajikan menjadi lebih representatif dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya (Lopes & Penela, 2025).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, PT Matahari Department Store Tbk disarankan untuk terus meningkatkan pengelolaan kontrak sewa dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan sewa yang diterapkan agar tetap sesuai dengan perkembangan standar akuntansi yang berlaku. Perusahaan juga perlu memperkuat sistem

pengendalian internal serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan pengukuran aset hak guna, liabilitas sewa, dan penentuan tingkat diskonto guna meminimalkan risiko kesalahan pencatatan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian pada lebih dari satu perusahaan atau membandingkan beberapa sektor industri sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak penerapan PSAK 73 dan PSAK 116 terhadap laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji pengaruh penerapan standar sewa terhadap kualitas audit, manajemen laba, maupun nilai perusahaan sehingga dapat memperluas pengembangan literatur akuntansi terkait implementasi standar akuntansi sewa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldebaran, R. A., Armein, E., & Prihartini, D. A. (2024). Analisis Dampak Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 73 (PSAK NO 73) Terhadap Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia, TBK. 3(3), 42–49.
- Alvionita, N., Kamila, A. C., Lusianti, Alfitri, S., & Febriyanti, R. (2025). Peran Transparansi Laporan Keuangan kepada Pihak Eksternal dalam Meminimalisir Asimetri Informasi. 2(2), 1–7.
- Amanda, R., & Sari, R. P. (2025). Isu Kontemporer Audit Pasca PSAK 73 : Perspektif Auditor. 3(1), 59–68.
- Ananta, G., Chandritike, S. N., & Yusnaini, Y. (2026). PSAK 73 and Changes to the Structure of Financial Statements : Is Transparency Increasing or Just a Reclassification ? 4(3), 844–856.
- Ferawati, & Sinaga, P. B. (2025). Implementasi PSAK 116 Terkait Sewa Pada PT. ABC. 12(1), 17–28.
- Fitri, A. N., Dimiyati, M., & Sari, N. K. (2024). Analisis Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP). 5, 181–201. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v5i2.1839>
- Fitriyani, W., & Febrianto, V. (2025). Analisis Perbandingan Penerapan PSAK 30 dengan PSAK 73 Pada Perusahaan Ritel yang Terdaftar di BEI (Studi Kasus PT. Sumber Alfaria Trijaya Periode 2018 dan 2023). 4(4), 1717–1725.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, 77–132.
- Kinanti, D. M., & Alvia, L. (2025). Kajian Literatur : Implementasi PSAK 116 (IFRS 16) Sewa dan Praktik Manajemen Laba. 3, 1–9.
- Lopes, A. I., & Penela, D. (2025). The impact of IFRS 16 on lessees' financial information: A single-industry study. *Advances in Accounting*, 68(July 2023), 100803. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2024.100803>
- Nabila, P. Y. M., & Febriyanti, G. A. (2025). Prosedur Audit Sewa PSAK 115 Pada PT X. 26(01), 1–6.
- Nurhasanah, D., Khairunisa, N., Audrinaya, V., Hermawan, T. P., Amelia, S., & Meidiyustiani, R. (2026). Implementasi Akuntansi Lessee Berdasarkan PSAK 116 serta Dampak Perubahan dalam Penyajian Laporan Keuangan. 6(2), 559–584.
- Respati, H. (2024). Analisa Dampak Penerapan Akuntansi Sewa Pembiayaan terhadap Laporan Posisi Keuangan , Laporan Laba Rugi , dan Rasio Solvabilitas : Studi Pada Perusahaan Terbuka di Indonesia. 5(9), 4019–4029.
- Rizaldi, F., & Munandar, A. (2025). Menyingkapi Penerapan PSAK 116 Terhadap Rasio Keuangan Berbasis Kemampuan Bayar : Studi Kasus Pada PT Mitra Adiperkasa Tbk. 18(1), 343–353.
- Rodiah, S., Saputra, R. surya, Putri, D. Y., Sahfitri, & Afriyanti, N. (2025). Penerapan Psak 23 dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Cv Trio Bros Cakrawala. 4(2), 11–20.
- Santoso, B. (2024). Analisis Penerapan PSAK 73 (Sewa) pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia. 3(1), 30–35.

Sura, A., & Ventura, E. Di. (2024). IFRS 16 and Its Impact on NFP and EBITDA a Theoretical and Empirical Analysis in European Companies. <https://doi.org/10.13132/2038-5498/15.4.799-823>